

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS MUTU

Oleh  
Dr Purwo Susongko, MPd

### ABSTRAK

*Paradigma pendidikan yang berorientasi pada proses di Indonesia terbukti tidak memberikan kontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Hasil riset menunjukkan kualitas sumber daya manusia jauh dibawah negara-negara lain walaupun pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 20 % dari APBN. Solusi yang tepat adalah dengan mengubah paradigma pendidikan dari orientasi proses kepada orientasi kualitas lulusan sehingga semua intstitusi pendidikan bertanggungjawab terhadap semua lulusanya*

*Kata kunci: Pengembangan, Pendidikan, mutu*

#### **A. Permasalahan Mutu Pendidikan**

Pendidikan adalah asset yang paling penting untuk suatu bangsa. Fakta menunjukkan banyak Negara yang secara geografis kecil dan relatif tak mempunyai sumber daya alam, tumbuh menjadi bangsa yang unggul karena lulusan dari sistem pendidikannya yang dapat diandalkan dan terjaga. Hal ini mengandung pengertian maju atau mundurnya suatu bangsa akan tergantung dari kualitas SDM nya, dan hal ini terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Hanya dengan pendidikan yang bermutu Bangsa ini akan dapat mengolah dengan baik sumber daya alam yang dimiliki bahkan dengan sumberdaya manusia yang unggul ketergantungan Bangsa ini terhadap kekayaan alam yang melimpah ruah semakin dapat dikurangi.

Setelah kejatuhan ekonomi Amerika di awal tahun 2009, Dunia dikagetkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di China yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Dunia, bahkan disusul oleh India dan selanjutnya Indonesia yang masih memiliki pertumbuhan ekonomi positif selama masa krisis ekonomi di tahun 2008/2009. Bahkan Indonesia dianggap Negara yang paling kondusif untuk investasi setelah China dan India untuk kawasan Asia. Namun hal ini semua dapat tercapai bila didukung dengan Sumber daya manusia yang berkualitas sebagai hasil dari proses pendidikan yang bermutu, sekali lagi pendidikan yang bermutu bukan pendidikan yang

seadanya. Pendidikan yang bermutu adalah investasi bagi bangsa, tetapi pendidikan yang buruk adalah pemborosan terhadap keuangan Negara.

Harapan Dunia yang besar terhadap Indonesia ternyata tidak dapat dijawab dengan baik oleh Bangsa kita sendiri. Akar masalahnya adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baru-baru ini banyak perusahaan asing yang memindahkan perusahaannya dari Indonesia ke Negara berkembang lain dengan alasan iklim investasi yang kurang mendukung di negeri kita dan buruknya manajemen tenaga kerja di Negara kita. Kalah bersaingnya produk kerajinan kita dengan Vietnam dan China, khususnya di pasar Eropa dan Amerika. Belum lagi buah-buahan lokal Indonesia dan produk elektronik yang ternyata belum menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, dan sebentar lagi dengan perdagangan bebas dengan China ancaman semakin membesar terutama dalam bidang tekstil dan sektor-sektor yang lain. Membanjirnya guru-guru dari luar negeri yang mengajar di sekolah-sekolah kita, banyaknya konsultan dari luar negeri yang memang ternyata lebih banyak dipakai, bahkan banyak orang Indonesia yang bangga kuliah s2 atau s3 di Malaysia, padahal pada tahun 80 an, banyak orang Malaysia bangga kuliah di universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Puncak dari lemahnya SDM terlihat bahwa bila bangsa lain datang ke Indonesia untuk menjadi guru, dosen dan konsultan maka bangsa kita rame-rame ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga, pekerja bangunan dan pekerjaan lain yang bersifat informal.

Hasil survei internasional *Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)* tahun 2007 menempatkan Indonesia pada peringkat 35 dari 46 negara peserta, jauh 14 tingkat dibawah Malaysia. Demikian pula hasil survei internasional yang lain, yaitu *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2006, peringkat Indonesia untuk Matematika adalah berada pada urutan 52 dari 57 negara, Untuk IPA, Indonesia berada pada peringkat 54 dari 57 negara. Untuk kemampuan membaca, Indonesia peringkat 51 dari 56 negara. Kita sudah benar-benar kalah bersaing dengan bangsa lain walaupun masih satu rumpun dengan kita. Akar masalah dari ini semua adalah rendahnya sumber daya manusia kita sehingga secara langsung kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pembangunan pendidikan kita belum berhasil

Pada saat di Indonesia terjadi penurunan mutu lulusan, di negara lain terutama di Malaysia dan Singapura justru terjadi sebaliknya. Upaya yang mereka lakukan ialah

menerapkan standar kelulusan bertaraf internasional ( standar Cambridge, Inggris ) . Artinya , guru dan sekolah diberi kebebasan besar dalam memilih kurikulum, cara mengajar , dsb , asalkan muridnya dapat lulus pada ujian dengan standar yang ditetapkan itu. Untuk itulah, didirikanlah lembaga yang berkewenangan penuh untuk menguji dan memberi sertifikasi, yang terpisah dari lembaga pembina sekolah. Meskipun pada mulanya terasa berat , namun pada saat ini sebagian besar sekolah di Malaysia telah mampu memenuhi tuntutan standar tersebut. Karena di negara-negara tetangga mutu lulusannya makin lama makin tinggi, kesenjangan mutu dengan negara kitaupun semakin lebar, dan pada gilirannya tentu akan membuat kita makin terpuruk dalam persaingan.

Apa akar masalah pendidikan kita sehingga belum juga dapat berhasil dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa? Sistem pendidikan di Indonesia selama ini cenderung terlihat lebih berorientasi dan terfokus pada input pendidikan dan prosesnya. Hingga tahun 2010 kita telah berhasil mengalokasikan 20 % APBN untuk pendidikan. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, meningkatnya kesejahteraan guru dan dosen, pemberian beasiswa yang semakin meluas bahkan munculnya sekolah gratis di banyak pemerintah daerah, apakah telah berdampak terhadap lulusan sekolah di Indonesia? Input pendidikan seperti sarana-prasarana dan kurikulum beserta prosesnya, memang sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar, tetapi hal ini saja tidak cukup. Betapapun besar anggaran untuk pendidikan dinaikan, betapapun lengkap fasilitas sekolah, jika muridnya tak dituntut untuk rajin membaca dan berlatih, tentulah tidak akan menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan. Sekolah di Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia adalah contoh dimana murid harus belajar amat rajin sehari-harinya. Itulah sebabnya kualitas SDM di sana meningkat pesat dan terbukti menjadikan mereka sebagai bangsa yang maju. Padahal di Korea Selatan , misalnya, selama puluhan tahun jumlah murid per kelas rata-rata 60-65 orang.

Kemalasan siswa untuk belajar bermula dari karena semenjak tahun 1968 standar kelulusan tidak lagi digunakan sebagai syarat seseorang mendapatkan ijazah seperti halnya terjadi sebelum tahun 1968. Dari hasil pemantauan selama lima tahun, 1996-2001, prosentase sekolah SMP kategori A (nilai rata-rata lulusan diatas 7,5) selalu dibawah 0.5 %, sementara sekolah kategori D (nilai rata-rata lulusan di bawah 5,5) meningkat dari 54.71% di tahun 1996 menjadi 81.93% di tahun 2001. Untuk tingkat SMA juga

menunjukkan angka yang tak jauh berbeda. Selanjutnya, jika dilihat dari standar yang digunakan dalam arti tingkat kesukaran soal yang diujikan, maka gambaran yang tampak lebih memprihatinkan. Sebagai contoh, sebelumnya, standar kelulusan minimum adalah nilai rata-rata 5.5 dan dengan soal yang sulit. Sesudahnya, tak digunakan lagi istilah kelulusan karena semua tamat, dan dengan soal yang amat mudah. Tahun 1984 sampai 2000, diberlakukan kebijakan penyesuaian (pengkatrolan) nilai dengan rumus PQR, yang membuat nilai akhir dalam STTB selalu tinggi. Hal ini bukan saja merupakan sejenis proses “pembodohan” secara nasional, tetapi juga melestarikan bahkan memperlebar jurang kesenjangan mutu lulusan antar daerah.

Hal ini berlangsung terus menerus sehingga ada riset yang mencengangkan kita bersama bahwa **soal ujian penghabisan kelas 6 Sekolah Rakyat tahun 1954 dan 1961 ternyata amat jauh lebih sukar daripada soal ujian Ebtanas tahun 1980an sampai dengan 1998 (Yahya Umur, 2004)**. Jelas sekali terlihat betapa terjadi penurunan tingkat kesukaran soal yang sangat ekstrim dari waktu sebelum standar kelulusan nasional dihapuskan pada tahun 1968, dengan setelahnya. Artinya lulusan SMP di tahun 1998 sama pandainya dengan lulusan Sekolah Rakyat di tahun 1954 hanya bedanya generasi tahun 50 an tidak akan pernah merusak sekolah bila dinyatakan tidak lulus namun bagi generasi sekarang, guru sangat takut untuk menyatakan siswa tidak naik atau tidak lulus karena akan terjadi perusakan sekolah dan tindakan anarki yang lain. Bahkan Bagi siswa yang tidak lulus di era sekarang sangat bahagia, karena justru dibantu oleh para guru, dan pejabat serta anggota DPR untuk rame-rame menolak ujian nasional, ibarat pepatah buruk rupa, cermin dibelah.

Dampak lain yang sangat serius dari tidak diterapkannya suatu standar nasional untuk kelulusan ( lulus 100%) ialah terhadap perilaku belajar murid dan perilaku mengajar guru. Karena tak ada yang tak lulus betapapun malasnya seorang murid , maka amatlah sulit untuk mendorong agar murid rajin belajar. Kalau di tahun 1960an atau sebelumnya setiap orang belajar mati-matian agar dapat lulus, maka setelah tahun 1970an hanya murid di sekolah tertentu atau di keluarga dengan tradisi tertentu saja yang masih mau rajin belajar. Tak ada kecemasan atas hasil ujian. Padahal semua orang tahu bahwa secerdas apapun seseorang jika tidak pernah membaca dan berlatih, tentulah tak dapat mencapai prestasi yang tinggi. Apalagi kalau kecerdasannya cuma rata-rata dan kerjanya

hanya bermain, malas-malasan, nonton TV, tanpa belajar, tentu tak mungkin jadi pandai. Bila pada tahun 50 an seorang siswa yang dihukum oleh guru, orang tuanya akan berterimakasih karena guru telah memberikan perhatian khusus, maka dewasa ini bila sedikit saja guru memberi hukuman, maka orang tua murid langsung tidak terima bahkan melaporkannya ke polisi atau media massa. Benar-benar dimanja siswa kita sekarang .

Keadaan lulus 100% juga berdampak buruk pada perilaku mengajar guru. Mereka umumnya merasa sudah aman dan selesai tugasnya jika telah melaksanakan semua kewajiban kurikuler meskipun murid-muridnya tak memahami yang diajarkan. Memang kenyataannya penilaian ataupun angka kredit bagi kinerja guru bukan diukur dari prestasi muridnya, melainkan lebih pada sejauh mana ia telah melaksanakan cara mengajar yang ditentukan. Itu sebabnya kebanyakan guru tak merasa gagal sepanjang seluruh rangkaian tugasnya selesai. Kenyataan bahwa setiap tahun lebih sejuta murid tamat SLTA yang berarti telah belajar Bahasa Inggris 4 jam per minggu selama 6 tahun, namun nyaris tak ada yang dapat berbahasa Inggris, tampaknya tak dianggap masalah serius.

Kondisi ini diperparah oleh pelaksanaan demokrasi secara liberal tanpa mengindahkan profesionalitas. Oleh karenanya kita menyaksikan kehidupan masyarakat sekarang sebagai hasil dari kondisi pendidikan yang carut marut. Adanya tuntutan menjadi guru PNS secara otomatis tanpa Tes CPNS, penentuan pejabat struktural di lingkungan pendidikan yang tanpa menghiraukan profesionalitas, politisasi guru demi kepentingan elit elitnya, semakin menjauhnya budaya sekolah bahkan sekolah-sekolah negeri dari nilai-nilai Pancasila yang menjaga kebinekaan, munculnya kelas jauh, jual beli ijazah, dan lain sebagainya adalah hasil dari proses pendidikan yang sejak orde baru tidak lagi melaksanakan standarisasi bagi kelulusan siswa. Bahkan setelah pemberlakuan ujian nasional, banyak dijumpai pembentukan tim sukses UN dengan cara-cara yang tidak terpuji demi meluluskan sebanyak-banyaknya siswa di suatu daerah, bahkan untuk mata pelajaran yang tidak diUN kan, dianggap pasti lulus atau otomatis lulus, karena diuji oleh sekolah sendiri. Hal ini menandakan sekolah-sekolah ternyata tidak dapat menghargai kewenangannya sendiri karena takut terhadap pejabat yang menginginkan lulus 100 % dan juga takut terhadap siswa-siswanya yang akan anarkis bila sampai tidak lulus. Kelulusan UN menjadi sesuatu yang prestise, para insan pendidikan lupa bahwa hasil penelitian menunjukkan kemampuan awal lebih berpengaruh dibanding dengan

pengalaman belajar sehingga sangat tidak arif jika kelulusan UN, menjadi parametr keberhasilan guru, kepala sekolah, kepala dinas maupun Bupati/walikota karena kondisi siswa tiap daerah mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda.

Karena itu, untuk memperbaiki keadaan di atas, sistem pendidikan di Indonesia sekarang harus lebih difokuskan pada pengendalian kualitas mutu lulusannya. Tidak boleh lagi ada dikhotomi antara pemerataan dengan mutu, di mana dengan alasan untuk pemerataan lalu mutu boleh dikorbankan dulu. Memenuhi hak asasi warga Negara untuk memperoleh pendidikan haruslah terkait dengan mutunya. Dan untuk itu diperlukan adanya system pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan (quality management). Seiring dengan upaya pengendalian mutu yang justru lebih membutuhkan tekad dan komitmen dari pada beaya.

Sebagai konsekuensi logis dari komitmen untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu, maka penggunaan angka partisipasi murid (prosentase anak usia tertentu yang berada di sekolah) sebagai indikator kemajuan pendidikan tentulah tidak cukup. Bahkan dapat menyesatkan. Ia harus dibarengi dengan indikator kualitas seperti “prosentase murid kelas tiga SD yang sudah mampu membaca”, “prosentase murid kelas tiga SMP yang mampu lulus standar Wajar 9 tahun”. “prosentase lulusan SMA yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris level tertentu”, dsb. Artinya, ada suatu standar yang digunakan pada setiap tingkatannya. Negara yang berhasil meningkatkan kualitas SDM nya melalui pendidikan, biasanya **tidak menggunakan angka partisipasi murid sebagai bentuk pertanggung jawaban (akuntabilitas) di bidang pembangunan pendidikan**. Yang digunakan sebagai indikator adalah tingkat kemampuan lulusan. Sebab itu, di Negara-negara tersebut biasanya terdapat lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji calon lulusan, atau bertugas memantau dan memetakan mutu sekolah. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengetahui sekolah yang meskipun sarannya melimpah tetapi sebenarnya tidak bermutu, atau sebaliknya.

Upaya peningkatan kualitas SDM harus dilakukan melalui konsepsi, strategi, dan kebijaksanaan yang tegas dalam pengendalian mutu, tanpa melupakan untuk mengedepankan pendidikan yang murah dan merata. Indikator yang dapat digunakan antara lain adalah: 1) **prestasi belajar siswa**, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan

menengah; 2) **kesenjangan mutu pendidikan**, baik antar sekolah maupun antar daerah; dan 3) **mutu pendidikan Indonesia** yang secara rata-rata dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN maupun internasional. Ketiga indikator ini hanya dapat dipantau jika diterapkan suatu standar nasional dalam meluluskan seorang murid. Dalam hal ini, standar tersebut hanya dapat diterapkan secara konsekuen jika ada sistim ujian yang obyektif dan skala ukuran yang komparabel dari tahun ke tahun. Ini memerlukan adanya lembaga otoritas pengujian yang menerapkan standar nasional secara konsekuen, yang terpisah dari lembaga penyelenggara/Pembina sekolah. Artinya, peetapan kelulusan seseorang murid berdasarkan standar yang ada, adalah sepenuhnya kewenangan lembaga pengujian, tanpa campur tangan sekolah, dinas, maupun direktorat jendral. Karena hasilnya justru menyangkut penilaian kinerja sekolah, dinas, dan direktorat jendral yang terkait tersebut. Adanya suatu otoritas pengujian dan peantauan mutu akan merupakan pendorong bagi kinerja sekolah, dinas dan direktorat jendral. Ini sejalan dengan asas akuntabilitas dan telah diterapkan di Negara yang maju pendidikannya.

Telah diketahui bersama, bahwa selain mutu pendidikan yang secara rata-rata rendah, ternyata kesenjangan mutu lulusan antarsekolah dan antar daerah juga sangat besar. Hal seperti ini tampak jelas pada data ujian masuk ke perguruan tinggi negeri yang setiap tahun dilakukan. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus karena ketimpangan tersebut akan secara langsung terkait dengan kesenjangan dalam hal peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan merupakan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional.

Hal lain yang penting adalah bahwa pendidikan harus dilihat sebagai masalah bangsa, bukan sekedar masalah orang per orang atau keluarga. Seorang pejabat di bidang pendidikan tidak boleh hanya memikirkan keadaan selama masa jabatannya, melainkan apa yang akan dicapai sepuluh atau dua puluh tahun kemudian. Kondisi hasil pendidikan yang dialami saat ini adalah buah dari kebijakan 10 atau 20 tahun yang lalu. Setiap orang yang menangani kebijakan pendidikan harus berbuat sebagai seorang negarawan yang berpikir untuk generasi berikutnya, bukan sebagai seprang politisi yang umumnya berpikir untuk satu periode pemilu. Dalam menangani pendidikan, apa yang kita lakukan mungkin baru dinikmati hasilnya oleh generasi yang berikutnya.

## **B. Pengembangan Sistim Penilaian**

Sejalan dengan pemikiran Yahya Umar(2004) , setidaknya ada beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk pengembangan sisitem penilain, yaitu: menggunakan standar nasional untuk menetapkan kelulusan,

- (1) mendorong diterapkannya sistim kurikulum yang lebih fleksibel dan tidak dirasakan sebagai beban dan belenggu oleh guru. Bahkan Alverno semenjak lebih dari 20 tahun yang lalu telah mengembangkan model pembelajaran dengan berbasis pada penilaian. Model ini lebih menekankan pada standar yang dikehendaki bukan pada model , media maupun materi pembelajaran yang diatur oleh kurikulum, namun guru dan sekolah diberi kebebasan besar dalam memilih kurikulum, cara mengajar , dsb , asalkan muridnya dapat lulus pada ujian dengan standar yang ditetapkan .
- (2) memiliki sistim ujian nasional dilaksanakan oleh suatu lembaga dengan otoritas penuh , mulai dari penyiapan soal sampai kepada pemberian sertifikat/ijazah,
- (3) mendorong sistim akreditasi sekolah berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan lulusan bermutu,
- (4) memiliki sistim pemantauan mutu lulusan secara periodik dan terlembaga,
- (5) mendorong terwujudnya sistim akuntabilitas dalam penyelenggaraan sekolah dengan birokrasi yang lebih berperan sebagai penyedia layanan,
- (6) mendorong terwujudnya sistim anggaran dan pembeayaan sekolah yang lebih menjamin peningkatan mutu,
- (7) dapat memperkecil kesenjangan mutu lulusan antar daerah maupun antar sekolah.

Adapun beberapa kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan sistim penilaian dengan karakteristik seperti disebutkan di atas adalah:

1. Pengembangan, penetapan dan penerapan suatu standar nasional tentang kompetensi lulusan bagi pendidikan dasar dan menengah agar kualitas dari setiap lulusan dapat diketahui dan terkendali. Setiap standar nasional yang ditetapkan hendaknya mempertimbangkan kemampuan sebagian besar murid untuk mencapainya namun sekaligus juga mempertimbangkan jangan sampai tak dapat diandalkan dalam menghadapi persaingan regional maupun global.



2. Penyesuaian sistim sertifikasi/ijasah persekolahan sehingga ijasah pendidikan dasar merupakan bukti pendidikan dasar minimal yang harus dimiliki oleh semua warga negara (general education/ijasah sekolah), sedangkan ijasah di tingkat pendidikan menengah (SMA) adalah menunjukkan kualifikasi/kompetensi yang telah dimiliki oleh pemegangnya (ijasah profil mata pelajaran/kompetensi).
3. Penerapan proses belajar mengajar yang menuntut murid agar belajar giat dan menuntut guru agar mengajar tuntas. Kondisi ini diperlukan dalam rangka penjaminan mutu lulusan. Untuk itu agar (a) dikembangkan sistim kenaikan kelas di SD dan SMP yang lebih menggambarkan kemampuan akademik murid, (b) diterapkan secara bertahap sistim kredit semester di SMA agar setiap ijasah menunjukkan kualifikasi pemegangnya (c) dibuat program penghargaan, bonus, atau beasiswa bagi guru yang berhasil, dan (d) klasifikasi sekolah atas dasar hasil akreditasi yang dikaitkan dengan persyaratan masuk menurut nilai ujian akhir di sekolah yang lebih rendah.
4. Menghindari sistim yang membakukan proses mengajar, yang lebih menggambarkan pembelengguan terhadap guru dari pada pencapaian hasil. Agar dilakukan deregulasi yang lebih memberi kebebasan kepada guru untuk memilih dan mengembangkan cara dan gayanya sendiri dalam mengajar sepanjang ia dapat mempertanggungjawabkan hasilnya serta tak ada aturan dan etika yang dilanggarnya.
5. Pembakuan proses ujian, khususnya ujian akhir pada setiap tingkatan kompetensi, sehingga hasil ujian dapat objektif dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak yang akan menerima atau menggunakan lulusan, termasuk perguruan tinggi. Agar segera dibentuk lembaga pengujian yang memiliki otoritas penuh dalam menyiapkan dan menyelenggarakan ujian, serta dalam menentukan kelulusan tanpa campur tangan birokrasi penyelenggara persekolahan (ini sesuai dengan tuntutan UU No.20 Tahun 2003). Juga agar dikembangkan sistim penyelenggaraan ujian yang handal, valid, dan murah serta mudah dilaksanakan sehingga para pengguna lulusan dapat mempercayai setiap hasil ujian. Pada sistim ujian yang terlembaga seperti

ini, setiap peserta ujian harus membayar biaya ujian dan bagi yang tidak mampu agar diberi subsidi/dibayar oleh negara. Dengan demikian, yang menerima subsidi memang mereka yang kurang mampu. Pada sistem yang sekarang, di mana setiap langkah penyelenggaraan ujian di bayai melalui proyek, murid di sekolah yang paling mewah dan mahal pun ikut menikmati subsidi pemerintah dalam biaya penyusunan soal, pencetakan soal, dsb. Karena merupakan kegiatan birokrasi dari pada pedagogis.

6. Penyederhanaan kurikulum nasional, agar mata pelajaran yang diwajibkan bagi semua murid diupayakan sesedikit mungkin jumlahnya, sedangkan kurikulum pilihan diupayakan selengkap mungkin sesuai kebutuhan murid apakah ia akan melanjutkan atau akan bekerja setelah lulus.
7. Pembaruan sistem akreditasi sekolah sehingga yang disebut sekolah baik bukanlah sekolah yang sarana-prasarananya melimpah melainkan yang mampu menghasilkan lulusan dengan mutu tinggi. Dengan kata lain, menyesuaikan kriteria penilaian sekolah sehingga hasil akreditasi akan lebih menggambarkan kemampuan sekolah dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dari pada menggambarkan kepemilikan sarana-prasarana. Berdasarkan hasil akreditasi agar dilakukan klasifikasi sekolah menengah menjadi sekurangnya tiga kategori. Sekolah dengan kategori tertinggi hanya khusus bagi lulusan pendidikan dasar yang mendapat nilai kategori tertinggi saja, begitu pula sekolah dengan kategori terendah. Sekolah istimewa/kategori tertinggi dapat dibuat setahun lebih singkat masa tempuhnya atau lebih tinggi dan mendalam tuntutan kompetensinya. Dalam hal ini diterapkan sistem pendidikan terbuka dalam arti setiap murid dapat pindah ke sekolah kategori tertinggi jika memiliki prestasi tinggi dan sebaliknya.
8. Agar dibentuk lembaga di wilayah Kabupaten/Kota khusus untuk melakukan pemantauan mutu pendidikan yang dalam hal ini adalah mutu lulusan dari tahun ke tahun dan dikaitkan dengan berbagai kebijakan makro yang telah dilaksanakan. Selain itu, lembaga ini bertugas memetakan mutu pendidikan khususnya dalam pemantauan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan mutu lulusan baik antar daerah maupun antar sekolah umum dan madrasah.

Pemantauan harus dilakukan dalam bentuk survei berkala terhadap indikator yang ditetapkan dan penyelenggaraannya harus memenuhi kaidah ilmiah yang berstandar internasional.

9. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu pendidikan sehingga seseorang akan merasa rugi jika tidak dapat ijazah tetapi tidak memiliki kompetensi yang diharapkan. Agar dilakukan kampanye nasional yang terprogram dan terukur hasilnya.

## REFERENSI

- Yahya Umar (2004) , Pengembangan Sistem Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional Di Era Global  
United Nations Development Programs (UNDP) , 2007. *Human Development Report 2007*.
- Ottobre, F.M. (Ed.), 1999. *The Role of Measurement and Evaluation in Education Policy*. UNESCO publishing,Paris.
- Umar , J., 1996. Grappling With Heterogeneity: *Assessment in Indonesia*. In A.Little and A. Wolf (Eds).: Assessment in Transition. Pergamon,Elsevier Science Ltd. Oxford,U.K